

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN
LABA PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI**

M. Cholid Mawardi

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam (UNISMA) Malang
JI MT. Haryono 193 Malang, No Telp: 081334544553**

Abstract;

This research was aimed to investigate the effect of corporate governance correlated with the compositions of board of independent directors, the size of director boards, audit committee and the size of the company to profit management happened in banking company listed in Indonesia stock exchange. In this research, profit management was measured by accrual estimate management detected by Healy model (1985). This model was the development of accrual prediction model with measuring estimate accrual as the total accrual (Dechow et al. 1995). The population of this research was all the Indonesian banking companies listed in Indonesian stock exchange since 2008-2010. The data of corporate governance and profit management were got from annual report, finance accounts of each company got from legitimate site of Indonesian stock exchange (www.idx.co.id). The analyzed companies were 84 (28x3) banking companies listed in Indonesian stock exchange since 2008-2010, and the sampling method used in this research was purposive sampling. The hypothesis of this research was tested by double linear regression. The result of the testing the hypothesis was shown that corporate governance variable correlated with compositions of board of independent directors, the size of director boards, audit committee and the size of the company simultaneously didn't correlate to the stock exchange.

Key words: Corporate Governance, Board of Independent Directors, The Size of Director Boards, Audit Committee, The Size of the Company, and Stock Exchange.

ABSTRAK

Aimed this research was to investigate the effect of corporate governance correlated with the Compositions of the board of independent directors, the size boards of directors, audit committee and the size of the company to profit happened in banking management company listed in Indonesia stock exchange. In this research, profit management was a Measured by accrual estimate detected management models by Healy (1985). This Model was the development of prediction models with measuring accrual estimate as the total accrual (Dechow et al. 1995). The population of this research was all the banking companies listed in Indonesian Indonesian exchange stock since 2008-2010. The data is of corporate governance and profit management were got from the annual report, finance accounts of each company got from the legitimate site of Indonesian stock exchange (www.idx.co.id). The Analyzed companies were 84 (28x3) companies listed in Indonesian banking stock exchange since 2008 to 2010, and the sampling method used in this research was purposive sampling. The hypothesis of this research was tested by linear regression doubled. The result of the testing of the hypothesis was shown that corporate governance Compositions of variables correlated with an independent board of directors, the size boards of directors, audit committee and the size of the company simultaneously did not correlate to the stock exchange.

Key words: Corporate Governance, Board of Independent Directors, The Size of the Director Boards, Audit Committee, The Size of the Company, and Stock Exchange.

PENDAHULUAN

Era globalisasi mengakibatkan persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk unggul dalam persaingan tersebut. Keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan yaitu dengan meningkatkan nilai dari masing-masing korporasi, cara yang digunakan oleh perusahaan tersebut salah satunya yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang bersih dan sehat (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hasil (laba) dari aktivitas operasi perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor serta kreditor asing mengenai penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan sebagai salah satu alat yang bisa memecahkan masalah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan. Untuk membatasi timbulnya masalah keagenan dibutuhkan suatu rangkaian tentang mekanisme yang disebut dengan *Good Corporate Governance*.

Tingkat penggunaannya dapat diukur dan dapat diperbandingkan satu sama lain. Beberapa metodologi untuk mengukur *Good Corporate Governance* sudah dikembangkan dan dapat digunakan oleh para pemakai, *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) misalnya mengembangkan suatu alat untuk melakukan penilaian pada *Good Corporate Governance* yang sekaligus dapat digunakan sebagai audit (FCGI, 2003).

Dua hal yang menjadi perhatian utama dalam konsep ini, pertama: pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan akurat dan tepat pada waktunya. Kedua: kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat pada waktunya dan transparan mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemegang kepentingan (*stakeholders*). *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer.

Industri perbankan sebagaimana diketahui erat kaitannya dengan kinerja pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika perekonomian tumbuh dengan baik, maka sektor perbankan

sewajarnya akan ikut tumbuh sejalan dengan perkembangan bisnis, industri dan perdagangan di sektor riil. Pada pertengahan tahun 2011, industri perbankan di Indonesia kembali mengalami panen laba yang mengesankan, diantaranya didorong oleh ekspansi kredit yang agresif, peningkatan pendapatan komisi, penurunan pencadangan yang berarti sebagian terangkat oleh penjualan saham anak perusahaan maka keuntungan perbankan terlihat baik di tahun tersebut.

Berbagai bentuk manajemen laba seperti *taking a bath*, perataan laba (*income smoothing*), maksimalisasi atau minimalisasi pendapatan dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam standar akuntansi seperti penerapan kebijakan akuntansi atau pemilihan metode akuntansi yang digunakan.

Dalam penelitian Wedari 2004 yang berjudul “Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba” menjelaskan bahwa keberadaan Komite Audit berpengaruh secara negatif signifikan terhadap akrual diskresioner. Variabel proporsi Dewan Komisaris berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap akrual diskresioner, variabel yang menunjukkan interaksi antara proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit berpengaruh secara negatif dan sangat signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap aktivitas manajemen laba. Variabel kepemilikan institusional menunjukkan hasil yang signifikan terhadap aktivitas manajemen laba.

Veronica dan Utama (2005) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktek *GoodCorporate Governance* Terhadap Pengelolaan Laba (*Earning Management*)” dengan menggunakan variabel-variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan paraktek *Corporate Governance*. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif pada pengelola laba serta dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap manajemen laba. Komite Audit mempunyai pengaruh negatif terhadap pengelola laba, sedangkan Proporsi Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba. Dari penelitian ini ditemukan bahwa variabel ukuran perusahaan secara konsisten mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap besaran pengelola laba yang dilakukan perusahaan, artinya semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil pengelola labanya. Selain itu, rata-rata pengelola laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi secara signifikan lebih tinggi dari pada pengelolaan laba pada perusahaan lain.

Nasution dan Setiawan (2007) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *GoodCorporate Governance* Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia” dari hasil pengujian regresi linier berganda dapat diketahui variabel komposisi Dewan Komisaris berpengaruh negatif secara signifikan akan terjadinya manajemen laba di perusahaan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen dalam Dewan Komisaris mampu mengurangi tindak manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan perbankan. Dengan kata lain makin banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dan makin banyak pula pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Sedangkan penelitian Sefiana (2010) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh penerapan *GoodCorporate Governance* Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia” dengan variabel Komposisi Dewan komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan ukuran Perusahaan, dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda, hasil dari penelitian ini bahwa variabel independen berupa *GoodCorporate Governance* yang diprosikan dengan Komposisi Dewan komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan ukuran Perusahaan, terbukti tidak berpengaruh baik secara simultan atau parsial untuk mengurangi tindakan manajemen laba. Hal ini dikarenakan penerapan *GoodCorporate Governance* masih terbilang baru di Indonesia jadi tujuannya belum secara efektif dapat dirasakan. Selain itu, penerapan GCG sudah mulai banyak diterapkan dalam dunia usaha namun pelaksanaannya masih belum dapat terpenuhi secara baik.

Pengertian *GoodCorporate Governance*

GoodCorporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, pada prinsipnya *GoodCorporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *GoodCorporate Governance* transparansi dan penjelasan serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit (Era, 2008), beberapa pakar mengemukakan mengenai definisi mengenai *GoodCorporate Governance*, diantaranya adalah:

GoodCorporate Governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para

pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dewan direksi dan pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan serta masyarakat luas (Arafat, Wilson, Mohamad Fajri MP, 2009).

Menurut Griffin (2002) pengertian *GoodCorporate Governance* adalah : “*The roles of shareholders, directors and other managers in Corporate decision making*. Menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga *GoodCorporate Governance* di Malaysia yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (Era, 2008).

GoodCorporate Governance juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Sedangkan unsur-unsurnya secara umum adalah :

- a. **Transparency** (transparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan terkait kondisi keuangan perusahaan serta informasi mengenai kepemilikan perusahaan.
- b. **Accountability** (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggungjawab, mendukung usaha perusahaan untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen serta pemegang saham sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
- c. **Responsibility** (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.
- d. **Independency**(independensi) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. **Fairness** (keadilan), menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor (PBI,2006).

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum adalah:

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu

keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut diatas, Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

2. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
3. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan pihak Independen. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut diharapkan dapat menciptakan *checkand balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas, perlu kejelasan pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak-pihak yang akan menjadi pihak-pihak independen.
4. Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi (*transparency*) sebagaimana termaksud di atas, Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Keberadaan laporan perusahaan untuk mengedukasi serta meningkatkan *checkand balance stakeholders* Bank dan persaingan melalui mekanisme pasar.
5. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Bank diwajibkan secara berkala melakukan *selfassessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sehingga apabila masih terdapat kekurangan andalan pengimplementasiannya, Bank dapat segera menetapkan rencana (*action plan*) meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

Komposisi Dewan Komisaris

Dewan komisaris secara umum diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kualitas informasi yang terkandung dari laporan keuangan, hal ini sangat penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang dapat berpengaruh pada kurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya Dewan Komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses terhadap informasi perusahaan akan tetapi Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka yang bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan perusahaan kepada Dewan Komisaris adalah dewan direksi (NCCG, 2001) Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi Dewan Komisaris yang lain dinyatakan dalam *National Code For Corporate Governance* 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial, mempertimbangkan kepentingan sebagai *stakeholder* perusahaan dan memonitor efektifitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Komisaris mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali, sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan. Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu, tempat dan semua rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama serta semua keputusan dalam rapat Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

Dalam setiap rapat Komisaris membuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang sedang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil juga pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Risalah rapat yang dibuat ditanda-tangani pimpinan rapat Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran adalah jumlah yang pas dari anggota Dewan Komisaris, termasuk ketuanya untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ukuran yang pas ini di pengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya:

- a. Ukuran Dewan Direksi.
- b. Industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan.
- c. *Overall risk* yang dihadapi.

d. Komite yang ada.

Jumlah Anggota Komisaris yang pas juga tergantung kepada industri dimana perusahaan berada karena akan turut menentukan jenis kompetensi yang sebaiknya dimiliki oleh Dewan Komisaris secara keseluruhan di karenakan Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam *Good Corporate Governance*.

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zehnder (2006) Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk serta memberi arahan pada pengelola perusahaan, karena sebagai manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen karena Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Era, 2008).

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 97 Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Lebih lanjut Pasal 98 UUPT menegaskan, bahwa Komisaris harus melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan Terbatas.

Komite Audit

Effendi (2007) Keberadaan komite Audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), adapun yang membentuk Komite Audit adalah Komite Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengelolaan perusahaan. Komite audit di Indonesia masih merupakan hal yang relatif baru karena perkembangan Komite Audit di Indonesia sangat terlambat dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut antara lain disebabkan pemerintah baru saja menetapkan kebijakan tentang pemberlakuan Komite Audit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu pada tahun 1999, Selain itu anjuran dari Bapepam kepada perusahaan yang telah go publik agar memiliki Komite Audit baru ditetapkan pada tahun 2000. Keberadaan Komite Audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan sangat diperlukan terutama dari aspek pengendalian, maka Komite Audit perlu mendapatkan perhatian dari manajemen dan Dewan Komisaris serta pihak-pihak terkait yang bertindak sebagai regulator seperti Menteri keuangan, Menteri BUMN, Bapepam dan Bursa Efek Indonesia.

Perkembangan praktek Komite Audit di Indonesia dapat dibedakan atas 3 (tiga) hal sesuai dengan jenis atau karakteristik perusahaan yang ada seperti Perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Perusahaan Publik, antara lain adalah: Komite Audit di Perbankan Indonesia, Komite Audit yang diwajibkan (diberlakukan) dikalangan perbankan dinamakan Dewan Audit atau Badan Audit. Dewan Audit diatur berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB/1995 tanggal 31 Maret 1995 Menurut ketentuan tersebut, Dewan Audit dalam perbankan memiliki 6 (enam) tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Menyetujui Internal Audit,
- 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal audit dan tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI,
- 3) Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta Instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
- 3) Memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sama dengan standar auditing yang berlaku.
- 4) Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai prinsip pengelolaan bank secara sehat.
- 5) Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI Seperti halnya komite audit di perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Besar kecil suatu perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya.

Menurut Riyanto dalam Huda (2008) bahwa:

Suatu perusahaan besar yang sahamnya tersebar sangat luas, perluasan saham akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilang atau tergesernya kontrol dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya, perusahaan kecil yang sahamnya tersebar dilingkungan kecil, jumlah saham perusahaan akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol pihak dominan terhadap pihak yang bersangkutan.

Adapun standar ukuran untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan belum ada standar ukuran yang berlaku secara umum. Irawan dalam Huda (2008) “standar yang dibuat hanya merupakan perkiraan dan masing-masing standar itu terbatas penerapannya, karena standar dari perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda-beda”.

Manajemen Laba

Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan

tujuan menyedatkan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Belkaoui 2006:75).

Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Wolk et Al. dalam Astuti (2010) mengatakan bahwa manajemen laba adalah suatu intervensi dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Scott dalam Halim dkk., (2005).

Purnomo dan Pratiwi (2009) mengatakan bahwa manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar. Saputro dan Setiawati (2004) mengatakan bahwa manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal guna mencapai tingkat laba tertentu dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau perusahaannya sendiri. (Utami, 2005) mengatakan bahwa manajemen laba adalah “ *some ability to increase or decrease reported net income at will* ”. Hal ini berarti manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai keinginan manajemen.

Hipotesis

Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba. (b) Komposisi Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba. (c) Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba. (d) Komite Audit Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba. (e) Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal comparative*) yaitu suatu penelitian mengenai karakteristik masalah yang berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Indriantoro dan Supomo, 2002:27).

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang sudah *go publik* atau terdaftar di BEI.

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 Desember 2008-2010 yang dinyatakan dalam (Rp).
3. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 Desember 2008-2010), baik data mengenai *Corporate Governance* perusahaan dan data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara dengan kata lain data tersebut telah diperoleh dan telah dicatat oleh pihak lain. Sumber data ini diambil dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang listing di BEI.

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data sesuai dengan tujuan penelitian yaitu dengan menggunakan regresi linier berganda (program *SPSS*). Analisa ini digunakan untuk mencari pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Secara sederhana dapat digambarkan formula sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + \dots + bX_n + e$$

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Sebagai dasar bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Ada dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (normal P-P plot) dan analisis statistik (analisis Z skor *skewness* dan kurtosis) *one sample Kolmogorov-Smirnov Test* (Firman, 2012).

Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui apakah terdapat gejala multi kolinieritas atau tidak maka dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance* dari print out analisis, jika nilai VIFnya kurang dari angka 10 atau nilai tolerancenya berada di atas 0,05 maka data yang dianalisis bebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik dan uji statistik, adapun cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan grafik adalah melalui grafik *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian

menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:105).

Uji Autokorelasi

Dalam uji ini tidak terdapat pengaruh variabel dalam model melalui tenggang waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Durbin- Watson d test*.

Uji Hipotesis

Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Uji ini digunakan untuk menguji keberartian pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama- sama. Nilai F_{hitung} menurut Gujarati (1995:121) dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Uji R^2

Koefisien diterminasi (R^2) menggambarkan tentang besarnya kemampuan menjelaskan secara bersama-sama dari variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) dalam beberapa pandangan menggunakan adjusted R^2 yang dinotasikan dengan \bar{R}^2 dalam mengukur derajat keeratan hubungan. Gujarati (1995:115) nilai R^2 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

PEMBAHASAN

Tabel 1.
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KDK	84	.00	1.00	.5137	.22439
UDK	84	1.00	9.00	4.9762	1.86906
KA	84	.00	1.00	.9643	.18669
Ukuran_perusahaan	84	1425576	2E+013	8E+011	2.875E+012
manajemen laba	84	-.48	.31	-.0038	.10236
Valid N (listwise)	84				

Dari statistik deskriptif dijelaskan bahwa rata-rata Komposisi Dewan Komisaris adalah 0,5137 dengan standar deviasi 0,22439. Rata-rata Ukuran Dewan Komisaris adalah

4,9762 dengan standar deviasi 1,86906. Rata-rata Komite Audit adalah 0,9643 dengan standar deviasi 0,18669. Rata-rata Ukuran Perusahaan adalah 8,000000000000 dengan standar deviasi 2,8750000000000000. Sedangkan rata-rata Manajemen Laba adalah -0,0038 dengan standar deviasi 0,10236.

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan terhadap sampel agar dapat mengetahui apakah sampel yang dipilih berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak, dalam pengujian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* (*K-S test*). Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi *K-S test* menunjukkan nilai *asymptod* signifikansi 0,259 nilai ini lebih besar dari $= 0,05$, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 2.
Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			84
Normal Parameters	a,b	Mean	.0000000
		Std. Deviation	.10023733
Most Extreme Differences		Absolute	.110
		Positive	.110
		Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z			1.010
Asymp. Sig. (2-tailed)			.259

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Uji Multikolinieritas

Tujuan Uji Multikolinieritas yaitu untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen, jika terjadi maka terdapat masalah multikolinieritas, untuk menghindari masalah multikolinieritas maka nilai VIF harus dibawah 10 dan nilai toleransi harus di atas 0,05.

Tabel 3.
Multikolinieritas

		Coefficients					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.088	.068		-1.294	.200		
	KDK	.067	.051	.148	1.309	.194	.956	1.046
	UDK	.005	.006	.094	.828	.410	.951	1.052
	KA	.027	.061	.048	.438	.663	.993	1.007
	Ukuran_perusahaan	-1.8E-015	.000	-.049	-.445	.657	.996	1.004

a. Dependent Variable: manajemen laba

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan statistik uji *Glejser*, caranya dengan meregresikan nilai absolut (Y) dari residual dengan variabel penjelas (X). Jika

variabel penjelas tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa hasil uji heterokedastisitas tidak terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap absolut residual. Hal ini menunjukkan bahwa model ini tidak melanggar asumsi heteroskedastisitas.

Tabel 4.
Heteroskedastisitas

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.040	.048		.842	.402
KDK	.044	.036	.140	1.235	.220
UDK	-.002	.004	-.064	-.563	.575
KA	.022	.042	.057	.511	.611
Ukuran_perusaha	-1.3E-015	.000	-.053	-.481	.632

a. Dependent Variable: abs_res1

Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Durbin-Watson* (DW), dari tabel *Durbin-Watson* dengan $N = 84$ dan $K = 4$ maka diperoleh nilai batas bawah atau $d_L = 1,5468$ dan nilai batas atas atau $d_U = 1,7462$ sedangkan hasil uji *Durbin-Watson* pada tabel 5 di bawah ini diperoleh nilai sebesar 2,164, nilai *Durbin-Watson* yang bebas dari gangguan autokorelasi terletak pada $range\ d_U < DW < 4 - d_U$. Sedangkan hasil uji autokorelasi dengan teknik *Durbin-Watson* jika dimasukkan dalam $range$ tersebut yaitu $1,7462 < 2,164 < 2,2538$, hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami problem autokorelasi.

Tabel 5.
Autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.203	.041	-.007	.10274	2.164

a. Predictors: (Constant), Ukuran_perusahaan, KDK, KA,

b. Dependent Variable: manajemen laba

Model Regresi Berganda

Analisis berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan membuat persamaan regresinya dengan menggunakan program *SPSS*.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang terdiri dari Uji F, *R Square* dan uji t pada Tabel 6 dapat diketahui persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = -0,08806 + 0,067296X_1 + 0,005121X_2 + 0,026523X_3 + -1,8E-15X_4 + \epsilon$$

Tabel 6.
Model Regresi Berganda

Variabel	koefisien regresi	t hitung	Sig. t
Konstanta	-0.08806	-1.29381	0.1995
KDK	0.067296	1.309289	0.194232
UDK	0.005121	0.827606	0.410387
KA	0.026523	0.437503	0.66294
Ukuran Perusahaan	-1.8E-15	-0.44532	0.657304
F hitung = 0.847			
T tabel = 1.99			
F tabel = 2.49			
sig. F = 0.50			
R square = 0.041			

Uji F-Statistik

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, berdasarkan hasil uji F pada tabel 6 terdapat nilai F hitung sebesar 0,847 dengan tingkat signifikansi 0,50 di atas $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel independen berupa Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit serta Ukuran Perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Uji t-Statistik

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada tabel 4.8 dapat dianalisa sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis 1

Variabel Komposisi Dewan Komisaris memiliki nilai t hitung sebesar 1,309289 dengan tingkat signifikansi 0,194232 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan secara parsial bahwa variabel Komposisi Dewan Komisaris (X_1) tidak berpengaruh terhadap

Manajemen Laba (Y). Artinya pengangkatan Komisaris Independen yang dilakukan oleh perusahaan hanya untuk pemenuhan regulasi saja, tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan. Penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Utama (2005) dan penelitian Sefiana (2010) yang menyatakan bahwa proporsi Komposisi Dewan Komisaris tidak terbukti berpengaruh terhadap tindak Manajemen Laba. Berbeda dengan penelitian Wedari (2004), Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh secara negatif terhadap Manajemen Laba di perusahaan perbankan.

Pengujian Hipotesis 2

Variabel Ukuran Dewan Komisaris mempunyai nilai t hitung sebesar 0,827606 dengan tingkat signifikansi 0,410387 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan secara parsial bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris (X2) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y). Artinya perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak maka tindak Manajemen Laba yang dilakukan perusahaan juga semakin banyak. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Selain itu, besar kecilnya dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Akan tetapi efektivitas mekanisme pengendalian tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi serta peran dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian (monitoring) terhadap manajemen. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sefiana (2010) juga penelitian Veronica dan Utama (2005), akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian Wedari (2004) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara negatif dan sangat signifikan terhadap Manajemen Laba. Artinya perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris dalam jumlah banyak maka tindak Manajemen Laba yang dilakukan semakin sedikit, begitu juga sebaliknya jika perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris dalam jumlah sedikit maka tindak Manajemen Laba yang dilakukan semakin banyak. Berbeda pula dengan penelitian Mediastuty dan Machfoedz (2003), Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba perusahaan secara signifikan. Artinya perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris dalam jumlah banyak maka tindak Manajemen Laba yang dilakukan juga semakin banyak.

Pengujian Hipotesis 3

Variabel Komite Audit memiliki nilai t hitung sebesar 0,437503 dengan tingkat signifikansi 0,66294 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat di simpulkan secara parsial

bahwa variabel Komite Audit (X3) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y). Artinya hasil penelitian ini membuktikan bahwa Komite Audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* tidak mampu mengurangi tindak manipulasi laba oleh manajemen, oleh karena itu ada atau tidak adanya Komite Audit dalam suatu perusahaan tidak mampu mengurangi tindak manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen, hal ini dikarenakan mengingat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* di Indonesia. Hasil penelitian memperkuat penelitian yang dilakukan Sefiana (2010) dan penelitian Veronica dan Utama (2005) yang melaporkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba di perusahaan perbankan. Akan tetapi penelitian ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh: Wedari (2004), Veronica dan Utama (2005) dan penelitiannya Nasution dan Setiawan (2007) yang kesemuanya menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba dalam perusahaan perbankan.

Pengujian Hipotesis 4

Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar -0,44532 dengan tingkat signifikansi 0,657304 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan secara parsial variabel Ukuran Perusahaan (X4) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Y). Artinya semakin besar atau kecil Ukuran Perusahaan tidak menyebabkan terjadinya Manajemen Laba. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Nasution dan Setiawan (2007) dan Sefiana (2010), akan tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian Veronica dan Utama (2005) yang menyatakan variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Manajemen Laba di perusahaan perbankan. Artinya semakin besar Ukuran Perusahaan, maka semakin kecil tindak Manajemen Laba dilakukan dalam perusahaan perbankan.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pengangkatan Komisaris Independen dan Komite Audit oleh perusahaan dilakukan hanya untuk pemenuhan regulasi saja, tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan; Perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak maka tindak Manajemen Laba yang dilakukan perusahaan juga semakin banyak. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut, hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Selain itu, besar kecilnya dewan komisaris bukanlah

menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Akan tetapi efektivitas mekanisme pengendalian tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi serta peran dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian (monitoring) terhadap manajemen; Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* tidak mampu mengurangi tindak manipulasi laba oleh manajemen. Hal ini berarti bahwa ada atau tidak adanya komite audit dalam suatu perusahaan belum tentu dapat mengurangi manajemen laba, hal ini dikarenakan mengingat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2006. *Accounting Theory (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendi, Muh. Arief. 2007. *Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1. No. 1, Mei: (2005:51–57).
- Era. 2008. *Peranan Dewan Komisar Dalam GCG*. www.wordpress.com (diakses 8 Maret 2012).
- Firman. 2012. *Uji Asumsi Klasik*. www.firmanharjuanjaya.com (diakses 23 Maret 2012).
- FCGI. 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan (Edisi Tiga)*, Jakarta.
- Gujarati. 1995. *Ekonimitrika Dasar*. Diterjemahkan oleh Sumarno Zain. Bandung: FE UNPAD.
- Healy, P. M and James M. Wahlen, 1998, *A Review of The Earning Management Literature and its Implications for Standard Setting*, *Accounting Horizon*, 13 December : 365-383
- Huda, Miftakhul. 2008. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dan Ukuran Perusahaan Di Industri Perbankan Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI)*. Skripsi: Unisma.
- Nasution, Marihot. dan Setiawan, Doddy. 2007. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia*. Artikel yang dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 10 Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.
- Sari, dan Bandi. 2010. *Praktik Manajemen Laba Terkait Peringkat Obligasi*. Artikel Yang di Presentasikan Pada Simposium Nasional Akuntansi 13 Purwokerto.
- Subramanyam, K.R. dan Wild, John J. Tahun 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. buku satu. (edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, K.R. dan Wild, John J. Tahun 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. buku satu. (edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.

Sefiana, Eka. 2010. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI)*. Skripsi: tidak di publikasikan.

UU No. 1 Tahun 1995. *Fungsi Dewan Komisaris Yang Lain Sesuai Yang Dinyatakan Dalam National Code For Corporate Governance (NCCG)*. 2001.

Veronica, Dr. Sylvia N.P. Siregar. Dan Utama, Dr. Siddharta. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)*. Artikel yang dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi 8 Solo 15 – 16 September 2005.

Wedari, Linda Kumusaning. 2004. *Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba*. Artikel Yang Dipresentasikan Pada Simposium Nasional Akuntansi 7 Denpasar 2-3 Desember 2004.